

## STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI ARAB SAUDI MELALUI DIVERSIFIKASI EKONOMI : ANALISIS DAMPAK STABILITAS KAWASAN DAN PERAN *RESOURCE REALLOCATION* DALAM KONFIGURASI EKONOMI- POLITIK TIMUR TENGAH

Assyiffah Aulia

Jurusan Hubungan Internasional,  
Program Pascasarjana, Fakultas  
Falsafah dan Peradaban, Universitas  
Paramadina

### Article history

Received: Februari 2026

Revised: Maret 2026

Accepted: April 2026

\*Corresponding author

[auliaassyiffah0@gmail.com](mailto:auliaassyiffah0@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai transformasi ekonomi dan kebijakan luar negeri Arab Saudi dalam kerangka Vision 2030 serta implikasinya terhadap diversifikasi ekonomi, diplomasi regional, dan dinamika hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi dokumen, penelitian ini menelaah sumber-sumber sekunder berupa dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, dan kajian akademik untuk memahami arah perubahan strategi Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Vision 2030 menjadi instrumen utama dalam mengurangi ketergantungan pada minyak melalui penguatan sektor non-migas, pengembangan energi terbarukan, reformasi tata kelola ekonomi, serta pemanfaatan sovereign wealth fund dan proyek strategis seperti NEOM sebagai sarana menarik investasi global. Di sisi eksternal, Arab Saudi menggeser pendekatan kebijakan luar negerinya dari pola konfrontatif menuju pragmatisme geoekonomi dan diplomasi multilateral melalui GCC, OIC, BRICS, serta kerjasama dengan Tiongkok. Namun demikian, transformasi ini belum sepenuhnya menghilangkan persoalan hak asasi manusia, karena represi domestik dan kritik terhadap transparansi proyek menjadi tantangan bagi legitimasi internasional Saudi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonsiliasi regional dan diplomasi ekonomi telah memperkuat posisi Saudi sebagai aktor utama dalam tatanan multipolar Timur Tengah.

**Kata Kunci:** Vision 2030, Diversifikasi Ekonomi, Geoekonomi, Diplomasi Multilateral, HAM.

### Abstract

This study examines Saudi Arabia's economic and foreign policy transformation within the framework of Vision 2030 and its implications for economic diversification, regional diplomacy, and human right dynamics. Using a qualitative descriptive analytical method based on document study, this study examines secondary sources in the form of official government documents, international agency reports, and academic studies to understand the direction of Saudi Arabia. The result show that Vision 2030 reconciliation strategy. The results show that Vision 2030 has become a key instrument for reducing dependence on oil through strengthening the non-oil and gas sector, developing renewable energy, reforming economic governance, and utilizing sovereign wealth funds and strategic projects such as NEOM as a means of attracting global investment. Externally, Saudi Arabia has shifted its foreign policy approach from confrontation to geoeconomic pragmatism and multilateral diplomacy through the GCC, OIC, BRICS, and cooperation with China. However, this transformation has not eliminated human rights issues, as domestic repression and criticism of project transparency continue to challenge Saudi Arabia's position as a key actor in the multipolar Middle East.

**Keywords:** Vision 2030, Economic Diversification, Geoeconomics, Multilateral Diplomacy, Human Rights.

## PENDAHULUAN

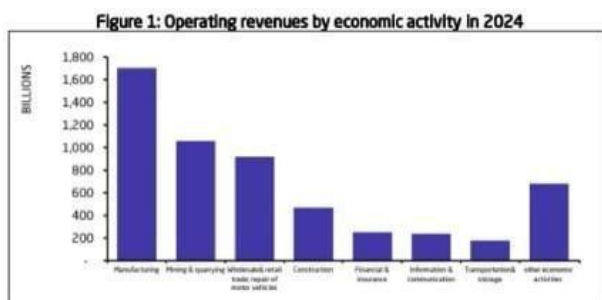
Diversifikasi ekonomi Arab Saudi terkenal sebagai model monokultur berbasis minyak menuju ekonomi yang lebih beragam. Pada tahun 2016, Saudi Vision 2030 diperkenalkan sebagai rencana reformasi komprehensif untuk mengurangi ketergantungan negara pada minyak (Kinninmont, 2017). Rencana ini mendorong pertumbuhan sektor-sektor non-migas seperti teknologi, pariwisata, dan pendidikan. Dalam narasi kualitatif, visi ini menggambarkan bahwa Saudi sedang membangun infrastruktur baru seperti kota futuristik NEOM dan mendorong privatisasi sektor energi seperti saham Aramco sebagai cara menarik investasi dan memperkuat peran pemerintahan demi tujuan keberlanjutan ekonomi. Hal ini dipandang krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidakpastian harga minyak.

Upaya diversifikasi Saudi juga diwujudkan dalam pembangunan industri nonmigas. Secara kualitatif, hal ini menunjukkan bahwa Saudi berusaha menciptakan rantai nilai ekonomi baru agar dapat menyediakan lebih banyak lapangan kerja dan penghasilan nonminyak bagi penduduknya, sejalan dengan demografi yang dominan dan tuntutan masyarakat akan perekonomian yang lebih modern. Sejumlah kajian menyimpulkan bahwa kontrak sosial di Saudi pun berubah, misalnya dengan meliberalisasi aturan sosial sebagai bagian dari strategi untuk memperbaiki citra global dan mendorong iklim usaha yang lebih menarik bagi investor asing (Arezki, 2024).

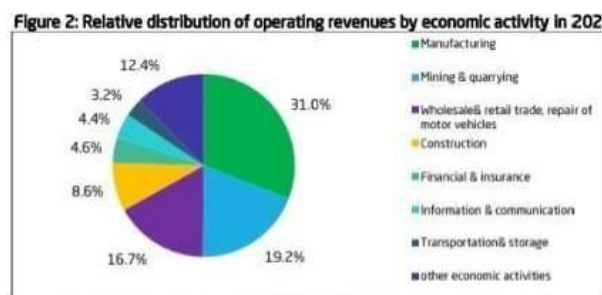
Proyek energi terbarukan tersebar di beberapa wilayah Arab Saudi, seperti Sakaka solar, ladang angin, Sudair solar, dan juga di ujung barat laut, kawasan NEOM menjadi pusat pengembangan energi bersih generasi baru (misalnya hidrogen hijau). Periode sejak diluncurkannya Visi 2030 pada tahun 2016 ditandai juga dengan adanya perubahan besar dalam sektor energi dan ekonomi Saudi Arabia. Secara umum, negara tersebut menerapkan diversifikasi ekonomi, reformasi pasar energi, dan investasi massif dalam energi terbarukan dan mempertahankan peran besar sektor migas. Konsumsi domestik minyak sebenarnya relatif kecil secara proporsional, tetapi meningkat (terutama untuk pembangkit listrik dan industri) bersama pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Penggantian sebagian pembakaran minyak dengan gas telah menjadi kebijakan penting. Saudi pun mendorong peningkatan produksi gas domestik dan membangun jaringan distribusi gas nasional. Berbagai langkah diversifikasi bertujuan mengurangi ketergantungan ke depan (Kinninmont, 2017).

Upaya diversifikasi dan diplomasi ekonomi Saudi juga terlihat dalam laporan FDI resmi yang menunjukkan bahwa pemerintah memperbarui metodologi statistik dan transparansi untuk meningkatkan akurasi data, yang merupakan sebuah upaya sistemik untuk membangun kredibilitas global sebagai target investasi yang kredibel. Selain itu, laporan Kementerian Ekonomi Saudi menyebutkan bahwa transformasi ekonomi negara diarahkan melalui investasi, infrastruktur, dan perubahan struktural dalam sistem ekonomi yang tahan terhadap guncangan eksternal (MISA, 2023). Arab Saudi mereformasi tata kelola ekonomi nasionalnya melalui Vision 2030, sebuah kerangka

kebijakan nasional yang secara eksplisit bertujuan mengurangi ketergantungan negara pada pendapatan minyak dan mendorong diversifikasi ekonomi.



Gambar 1. Operating revenues by economic activity in 2024



Gambar 2. Relative distribution of operating revenues in 2024

Source: General Authority for Statistics Saudi, (2024).

Data pada Gambar 1 dan Gambar 2 menunjukkan struktur ekonomi Arab Saudi berdasarkan kontribusi pendapatan operasional dan distribusinya menurut sektor ekonomi. Gambar 1 memperlihatkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan operasional, diikuti oleh sektor manufaktur dan perdagangan. Sementara itu, Gambar 2 menunjukkan distribusi relatif yang menegaskan dominasi sektor berbasis sumber daya alam dalam struktur ekonomi nasional. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah pelaku usaha lebih banyak berada pada sektor perdagangan dan jasa, kontribusi ekonomi terbesar tetap berasal dari sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi, khususnya sektor migas. Dalam konteks Saudi Vision 2030, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Arab Saudi masih berada dalam tahap transisi dari model ekonomi berbasis minyak menuju ekonomi yang lebih terdiversifikasi. Dengan demikian, kedua gambar tersebut merefleksikan urgensi kebijakan diversifikasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Arab Saudi melalui penguatan sektor non-migas, pengembangan industri manufaktur, serta investasi pada energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan minyak.

Dalam konteks Saudi Vision 2030, temuan ini relevan karena agenda diversifikasi ekonomi Saudi berupaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor migas melalui penguatan industri nonmigas. Dengan demikian, data tersebut dapat dibaca sebagai gambaran bahwa transformasi ekonomi Saudi sedang bergerak dari model ekonomi berbasis ekstraksi menuju struktur ekonomi yang lebih beragam, kompetitif, dan berdaya tahan terhadap dinamika pasar global. Dari perspektif hubungan internasional, temuan ini juga memperlihatkan posisi Saudi dalam geopolitik energi global. Dominasi pertambangan dalam pendapatan menunjukkan bahwa sektor sumber daya alam masih memiliki peran sentral dalam ekonomi nasional, sehingga perubahan harga energi dunia, transisi energi global, dan kompetisi pasar internasional tetap menjadi faktor penting

bagi stabilitas Saudi. Karena itu, Saudi Vision 2030 dapat dipahami bukan hanya sebagai program pembangunan domestik, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat daya tawar Saudi dalam ekonomi politik internasional. Melalui diversifikasi industri, pengembangan manufaktur, dan penguatan sektor perdagangan serta jasa, Saudi berupaya membangun kemandirian ekonomi yang tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi pasar energi global (Farouk, 2023).

Arab Saudi secara diplomatis menempatkan diri sebagai kekuatan utama di kawasan Timur Tengah dengan menerapkan pendekatan diplomasi spesifik untuk memperkuat pengaruhnya. Saudi fokus pada bidang-bidang strategis sesuai dengan keunggulannya, seperti menjadi mediator konflik regional, memberikan bantuan kemanusiaan, dan memimpin inisiatif energi baru untuk memperluas pengaruhnya di dunia (Farouk, 2023). Contohnya, Riyadh aktif terlibat dalam mediasi konflik Yaman dengan kelompok Houthi, mengadakan pembicaraan gencatan senjata pada tahun 2023, serta memperkuat pendekatan diplomatik sebagai solusi untuk mengatasi krisis regional. Hubungan Saudi dengan negara-negara Teluk juga mencerminkan perubahan strategi diplomatik yang fleksibel (Meester, 2018). Sebagai negara Teluk terbesar yang mengontrol hampir 20% dari aliran minyak global dan menjadi pemain utama dalam energi dunia, kebijakan luar negeri Arab Saudi mempunyai dampak yang luas. Meskipun pernah terjadi ketegangan seperti blokade terhadap Qatar pada tahun 2016-2017, studi menunjukkan bahwa Saudi bertindak untuk menjaga keutuhan GCC melalui koordinasi bersama dan menjaga stabilitas wilayah (Li & Aminjonov, 2024). Riyadh juga berinvestasi pada keamanan dan pembangunan, kembali membuka dialog setelah konflik, serta memperkuat persatuan Teluk menghadapi tantangan bersama.

Konteks transformasi strategi kebijakan luar negeri Arab Saudi pasca-rekonsiliasi tahun 2023, peran aktor nonnegara, termasuk lembaga swadaya masyarakat internasional seperti Amnesty International, menjadi sangat relevan (Hassan, 2023). LSM internasional tidak hanya berfungsi sebagai pemberi pressure normatif terhadap negara, tetapi juga berperan sebagai knowledge broker yang menyediakan dokumentasi, temuan lapangan, dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkaya analisis akademik. Amnesty, dengan metodologi pemantauan hak asasi manusia yang sistemik. Dan implikasi hak asasi yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial maupun risiko reputasi bagi negara di panggung internasional. Oleh karena itu, studi tentang bagaimana Saudi memadukan agenda Vision 2030 dengan kebijakan luar negeri perlu memasukkan perspektif LSM sebagai alat verifikasi independen terhadap narasi. Secara analitis, pelanggaran HAM yang dibiarkan berulang dapat mengikis kepercayaan investor, memicu resistensi domestik, dan akhirnya mengganggu stabilitas daerah yang menjadi prasyarat sukses Vision 2030. Dalam penelitian kualitatif dokumen, laporan Amnesty berfungsi sebagai sumber sekunder primer, dokumen yang memuat empirisme lapangan, kronologi insiden, dan analisis hukum. Ketika digabungkan dengan wawancara terstruktur, informan: analisis Amnesty Internasional, peneliti HAM, perwakilan NGO lainnya. Penelitian ini dapat menelusuri sisi kebijakan ekonomi-geoekonomi yang dipromosikan

pemerintah dan sisi pengaruhnya terhadap hak asasi baik di tingkat regional maupun kawasan (Amnesty, 2021).

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif-analitis dengan mendalami studi kasus tentang Arab Saudi, menggunakan analisis sumber sekunder terkait, dan menelaah aspek politik, keamanan, ekonomi, dan diplomasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi berfungsi sebagai alat untuk mengurangi konflik politik-keamanan, serta membuka peluang untuk meningkatkan diplomasi multilateral, seperti melalui organisasi GCC, OIC, dan BRICS, serta memperluas kerja sama ekonomi dengan China melalui BRI. Dengan demikian, Arab Saudi mengurangi ketergantungan yang sebelumnya terhadap Amerika Serikat. Perubahan ini terlihat dari fokus pada stabilitas, investasi dan pembentukan kemitraan dengan berbagai pihak, sehingga menjadikan Saudi sebagai pelaku utama dalam sistem politik regional yang berbentuk multipolar. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan contoh kasus nyata yang menghubungkan de-eskalasi politik dengan diplomasi ekonomi (Harrison, 2023). Dokumen Vision 2030 menempatkan pembangunan manusia, investasi strategis dan transformasi institusional sebagai tiga instrumen utama untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut. Untuk mewujudkan visi itu, Suaid mengubah peran sovereign fund, yaitu Public Investment Fund (PIF), yang kini diposisikan sebagai pembiayaan pembangunan domestik dan alat diplomasi ekonomi (PIF, 2023). Megaprojek seperti NEOM dipasarkan bukan semata-mata sebagai proyek domestik, melainkan sebagai platform transnasional untuk menarik teknologi, modal, dan talenta, sehingga berfungsi juga sebagai instrumen soft power. Pelaksanaan kebijakan investasi dan paket insentif memberikan landasan legal dan fiskal untuk meningkatkan daya tarik FDI dan kemitraan multinasional (NEOM, 2022).

Peningkatan ini mencerminkan permintaan global yang tinggi terhadap produk minyak olahan yang memperkuat peran Saudi sebagai pemain energi terintegrasi. Secara kontekstual, kenaikan kuat di sektor migas terutama disebabkan oleh harga energi yang tinggi dan upaya Saudi menaikkan produksi olahan dalam negeri. Sementara itu, sektor non-migas yang tumbuh positif (meski lebih moderat) menunjukkan kestabilan ekonomi domestik di luar negeri. Dinamika ini menegaskan posisi strategis Saudi di pasar global, seperti eksportir energi sekaligus pusat pengolahan dan distribusi energi. Dengan strategi visi 2030 yang mengembangkan energi terbarukan dan nilai tambah industri, Saudi semakin diposisikan sebagai negara energi terintegrasi yang berpengaruh di tingkat dunia. Transformasi dalam negeri ini dijalankan bersamaan dengan strategi luar negeri yang realistis. Riyadh mulai memanfaatkan peluang diplomasi ekonomi untuk memperkuat hubungan dengan Tiongkok, negara-negara Asia, Afrika, serta organisasi internasional lainnya. Momentum kembalinya hubungan antara Saudi dan Iran pada tahun 2023 memberikan ruang politik untuk membicarakan kerja sama lintas sektor, meskipun banyak usaha masih memerlukan waktu karena hambatan struktural dan masalah sanksi. Dengan menurunnya tingkat konflik langsung, Pemerintah Saudi memiliki ruang politik yang lebih besar untuk memprioritaskan investasi dan

pembangunan ekonomi sebagai bagian dari kebijakan luar negeri mereka. Pendekatan ini disebut geoekonomi, di mana alat ekonomi seperti investasi dan proyek infrastruktur dipakai untuk mencapai tujuan geopolitik dan pengaruh daerah (PIF, 2023).

Riyadh juga aktif mengoptimalkan forum multilateral seperti GCC, OIC, serta dialog dengan BRICS untuk memudahkan negosiasi multilateral dan membuka jalan kerja sama investasi. Inisiatif Saudi-Afrika menjelaskan upaya memperluas pengaruh ekonomi melalui proyek pembangunan dan bantuan infrastruktur, menunjukkan arah kebijakan luar negeri yang lebih luas. Namun, keberhasilan strategi diplomasi ekonomi bergantung pada legitimasi internasional dan pengelolaan yang baik. Isu hak asasi manusia, transparansi proyek, serta dampak lingkungan sering menjadi kritik yang bisa mengurangi daya tarik investasi jangka panjang. Secara strategis, Riyadh menjalankan pendekatan multi-alignment agar bisa mendapatkan manfaat ekonomi maksimal tanpa kehilangan opsi keamanan tradisional. Dampak akhir dari transformasi ini terhadap konfigurasi ekonomi-politik daerah sangat bergantung pada pelaksanaan proyek besar, kelanjutan investasi, serta stabilitas hubungan regional yang lebih daerah (PIF, 2023).

Pada periode selanjutnya, kebijakan luar negeri Arab Saudi lebih mengutamakan pendekatan yang defensif dan konfrontatif terhadap Iran serta aktor-aktor pendukungnya melalui dukungan proxy dan intervensi militer terbatas. Namun, kebijakan seperti ini membawa risiko konflik yang terus menguras sumber daya dan merusak reputasi stabilitas regional. Munculnya inisiatif diplomatik dari sisi China sebagai mediator dalam perselisihan Saudi-Iran, yang berpuncak pada rekonsiliasi diplomatik pada tahun 2023, membuka peluang baru untuk mengalihkan paradigma kebijakan luar negerinya ke arah pragmatisme ekonomi dan diplomasi multilateral. Transformasi ini bukan hanya soal normalisasi hubungan bilateral, melainkan bagaimana Riyadh menstruktur ulang strategi diplomasi, investasi, dan konfigurasi aliansi regional. Sejalan dengan itu, Arab Saudi telah meluncurkan Vision 2030, rencana ambisius jangka panjang untuk mendiversifikasi ekonomi, memperkuat sektor nonmigas, dan membangun citra global sebagai negara investasi dan inovasi, bukan hanya sekadar eksportir minyak. Dokumen resmi Vision 2030 menyebutkan bahwa Saudi ingin mengubah posisi geografisnya menjadi penghubung global Asia, Afrika, dan Eropa, serta menarik investasi luar negeri untuk memperkuat kapasitas domestik. Laporan tahunan Vision 2030 menegaskan bahwa Kerajaan telah memperluas domainnya dalam pemerintahan transparan, efisiensi birokrasi, dan program-program ekonomi strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi (Government of Saudi Arabia, 2016). Tujuan penelitian ini adalah melihat strategi kebijakan luar negeri arab sudi melalui diversifikasi ekonomi dari sisi analisis dampak stabilitas kawasan dan peran *resource reallocation* dalam konfigurasi ekonomi-politik timur tengah

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena fokusnya pada analisis data. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dan konteks fenomena dalam studi, menggunakan proses induktif untuk membangun pemahaman dari data. Menurut Kinninmont (2017), pendekatan ini memungkinkan peneliti menyajikan dan menafsirkan informasi yang dikumpulkan secara naratif. Pendekatan deskriptif kualitatif ini didukung oleh prinsip interpretivisme dan berpikir induktif, di mana peneliti menafsirkan makna data untuk membangun pola-pola pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan Geoeconomics dan Rentier Theory sebagai bingkai yang menjelaskan mekanisme domestik dan instrumen kebijakan. Dari perspektif neoclassical realism, perubahan orientasi luar negeri Riyadh tidak dapat dipahami semata-mata sebagai respons pasif terhadap struktur sistem internasional, seperti perubahan harga minyak dan pergeseran kekuatan regional saja, melainkan sebagai hasil interaksi antara tekanan eksternal dan kondisi serta persepsi domestik—termasuk kapasitas negara, preferensi elit, dan realokasi sumber daya negara (resource reallocation). Oleh karena itu, referensi ekonomi yang diprakarsai oleh Vision 2030 dan pengalihan modal publik melalui pemberdayaan *Public Investment Fund* (PIF) menjadi variabel kunci yang menerjemahkan kondisi struktural menjadi pilihan strategis luar negeri seperti multilateralisme, intensifikasi diplomasi ekonomi, dan normalisasi hubungan dengan aktor pesaing (Kinninmont 2017).

## **HASIL DAN DISKUSI**

Transformasi ekonomi Arab Saudi dalam kerangka Saudi Vision 2030 merupakan upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan struktural terhadap minyak sekaligus membangun fondasi ekonomi yang lebih terdiversifikasi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2016, Vision 2030 diposisikan sebagai agenda reformasi komprehensif yang diarahkan untuk memperluas peran sektor non-migas, seperti teknologi, pariwisata, pendidikan, manufaktur, dan energi terbarukan. Dalam konteks ini, transformasi ekonomi Saudi tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga merupakan bagian dari rekonstruksi model pembangunan nasional yang sebelumnya sangat bergantung pada pendapatan minyak. Secara empiris, proses diversifikasi tersebut tercermin dalam pembangunan berbagai proyek strategis berskala besar, seperti NEOM, yang diproyeksikan sebagai kota futuristik berbasis teknologi tinggi dan energi bersih. Selain itu, pemerintah juga mendorong privatisasi terbatas dan optimalisasi aset negara, termasuk melalui pemanfaatan Saudi Aramco dan Public Investment Fund (PIF) sebagai instrumen untuk menarik investasi, memperkuat kapasitas fiskal, serta mendukung agenda pembangunan jangka panjang. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara berupaya mengalihkan sumber daya dari pola ekonomi rentier menuju mekanisme yang lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi (Aramco, 2019).

Diversifikasi ekonomi Saudi juga terlihat dalam pengembangan industri non-migas

yang bertujuan menciptakan rantai nilai baru, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan sumber pendapatan non-minyak bagi masyarakat. Upaya ini relevan dengan struktur demografis Saudi yang didominasi oleh usia produktif dan tuntutan sosial terhadap perekonomian yang lebih modern, inklusif, serta kompetitif di tingkat global. Pada saat yang sama, reformasi sosial yang menyertai transformasi ekonomi turut berperan dalam membentuk citra Saudi sebagai negara yang lebih terbuka. Liberalisasi sosial dan pembaruan regulasi dipahami sebagai bagian dari strategi untuk memperbaiki reputasi internasional sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi investor asing (Arezki, 2024). Dalam sektor energi, perubahan kebijakan Saudi menunjukkan pola transisi yang tidak sepenuhnya meninggalkan migas, melainkan mengarah pada restrukturisasi penggunaan energi nasional. Di satu sisi, konsumsi minyak domestik tetap meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi; di sisi lain, pemerintah mulai mendorong substitusi sebagian penggunaan minyak dengan gas serta memperluas investasi pada energi terbarukan. Proyek seperti Sakaka Solar, Sudair Solar, pengembangan ladang angin, dan kawasan NEOM sebagai pusat inovasi energi bersih memperlihatkan komitmen Saudi terhadap transisi energi yang lebih berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut menandakan bahwa Saudi sedang membangun model ekonomi energi yang lebih terintegrasi, yakni tetap mempertahankan peran sektor migas sambil secara bertahap memperluas basis energi alternatif (Kinninmont, 2017).

Dari perspektif ekonomi politik internasional, dominasi sektor pertambangan memperlihatkan bahwa posisi Saudi dalam sistem energi global masih sangat penting. Fluktuasi harga minyak dunia, percepatan transisi energi, dan persaingan geopolitik di pasar energi tetap menjadi variabel utama yang memengaruhi stabilitas ekonomi nasional (Oxford Institute for Energy Studies, 2023). Oleh karena itu, diversifikasi yang dilakukan Saudi dapat dipahami bukan semata-mata sebagai program pembangunan domestik, melainkan sebagai strategi untuk memperkuat daya tawar negara dalam tatanan ekonomi global (Farouk, 2023). Melalui penguatan industri manufaktur, perdagangan, dan jasa, Saudi berupaya mengurangi kerentanan terhadap ketidakpastian eksternal sekaligus meningkatkan kapasitas adaptif ekonomi nasional. Selain transformasi ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan orientasi ekonomi Saudi beriringan dengan penyesuaian strategi kebijakan luar negeri. Arab Saudi semakin menempatkan diri sebagai aktor sentral di Timur Tengah dengan mengedepankan diplomasi ekonomi, mediasi konflik regional, bantuan kemanusiaan, serta keterlibatan dalam agenda energi global (Farouk, 2023). Pendekatan ini memperlihatkan pergeseran dari kebijakan luar negeri yang lebih konfrontatif menuju strategi yang lebih pragmatis dan berbasis stabilitas. Contohnya, keterlibatan Riyadh dalam upaya mediasi konflik Yaman dan pembicaraan gencatan senjata pada 2023 menunjukkan bahwa diplomasi kini menjadi instrumen penting untuk menjaga pengaruh sekaligus mengurangi risiko konflik yang menguras sumber daya negara (Farouk, 2023).

Hubungan Saudi dengan negara-negara Teluk juga mencerminkan fleksibilitas

diplomasi yang semakin besar. Meski sempat terjadi ketegangan, termasuk blokade terhadap Qatar pada 2016–2017, studi menunjukkan bahwa Saudi tetap berupaya mempertahankan keutuhan GCC dan menjaga stabilitas kawasan melalui koordinasi regional dan dialog berkelanjutan (Meester, 2018). Hal ini menegaskan bahwa kepentingan stabilitas kawasan menjadi pertimbangan utama dalam formulasi kebijakan luar negeri Saudi. Dalam konteks yang lebih luas, posisi Saudi sebagai pengendali sebagian besar arus minyak global membuat setiap keputusan luar negerinya memiliki konsekuensi ekonomi dan geopolitik yang luas. Pada fase pascarekonsiliasi 2023, kebijakan luar negeri Saudi menunjukkan orientasi yang semakin geoekonomis. Rekonsiliasi dengan Iran membuka ruang bagi Riyadh untuk mengurangi ketegangan regional dan mengalihkan fokus kebijakan pada investasi, pembangunan, dan kemitraan ekonomi. Dalam kerangka ini, alat ekonomi seperti investasi, infrastruktur, dan proyek lintas kawasan digunakan sebagai sarana untuk memperkuat pengaruh geopolitik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pendekatan militer atau aliansi tradisional. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep geoekonomi, yaitu penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan strategis di kawasan (Chivvis et al., 2023).

Saudi juga memanfaatkan forum multilateral seperti GCC, OIC, dan dialog dengan BRICS untuk memperluas jejaring kerja sama internasional. Melalui forum-forum tersebut, Riyadh tidak hanya mencari legitimasi politik, tetapi juga membuka ruang bagi investasi, perdagangan, dan kerja sama pembangunan. Inisiatif Saudi-Afrika, misalnya, memperlihatkan upaya memperluas pengaruh melalui diplomasi pembangunan dan proyek infrastruktur lintas kawasan. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Saudi dalam kerangka Vision 2030 tidak lagi semata-mata berorientasi pada keamanan, tetapi juga pada pembentukan citra negara sebagai pusat investasi, inovasi, dan konektivitas regional (Harrison, 2023; Doha Institute, 2023). Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transformasi kebijakan ini tidak sepenuhnya bebas dari kritik, terutama terkait isu hak asasi manusia, transparansi, dan legitimasi internasional. Dalam konteks ini, peran aktor non-negara seperti Amnesty International menjadi penting sebagai sumber verifikasi independen terhadap narasi resmi pemerintah. Laporan-laporan Amnesty menyediakan dokumentasi empiris, kronologi insiden, dan analisis normatif yang dapat digunakan untuk membaca dampak sosial-politik dari kebijakan Saudi, baik di tingkat domestik maupun regional (Amnesty, 202). Dengan demikian, isu hak asasi manusia tidak hanya relevan sebagai persoalan normatif, tetapi juga sebagai faktor yang dapat memengaruhi reputasi internasional, kepercayaan investor, dan stabilitas jangka panjang.

Dalam beberapa kasus sebelum dan selama transformasi kebijakan, Arab Saudi terlibat dalam praktik intervensi regional yang menimbulkan kritik keras, seperti perang di Yaman dan intervensi di Bahrain. Perang Yaman, misalnya, memperlihatkan dampak kemanusiaan yang sangat besar, termasuk serangan terhadap fasilitas sipil, blokade yang memicu krisis pangan, dan meningkatnya penderitaan penduduk sipil. Sementara itu, intervensi di Bahrain pada 2011 menunjukkan bagaimana Saudi menggunakan instrumen

keamanan untuk menjaga stabilitas politik kawasan. Walaupun dalam periode pascarekonsiliasi Saudi menunjukkan pendekatan yang lebih moderat di level eksternal, laporan penelitian mengindikasikan bahwa represi tidak sepenuhnya hilang, melainkan bergeser ke dalam bentuk kontrol domestik dan pengelolaan politik yang lebih ketat (Hassan, 2023). Saudi Vision 2030 bukan hanya agenda reformasi ekonomi, tetapi juga proyek restrukturisasi ekonomi-politik yang memengaruhi orientasi kebijakan.

## **KESIMPULAN**

Saudi Vision 2030 merupakan instrumen utama dalam transformasi strategis Arab Saudi, tidak hanya sebagai agenda pembangunan ekonomi domestik, tetapi juga sebagai dasar perubahan orientasi kebijakan luar negeri Kerajaan. Melalui diversifikasi ekonomi, penguatan sektor non-migas, pemanfaatan Public Investment Fund (PIF), pengembangan proyek-proyek strategis seperti NEOM, serta perluasan investasi pada energi terbarukan dan industri bernilai tambah, Arab Saudi berupaya mengurangi ketergantungan historisnya terhadap minyak sekaligus membangun struktur ekonomi yang lebih adaptif terhadap dinamika global. Proses ini memperlihatkan adanya resource reallocation yang signifikan, di mana sumber daya negara dialihkan dari pola ketergantungan rentier menuju instrumen pembangunan, diplomasi ekonomi, dan peningkatan daya saing internasional. Dalam ranah kebijakan luar negeri, transformasi tersebut mendorong Arab Saudi bergeser dari pendekatan yang cenderung konfrontatif menuju strategi yang lebih pragmatis, multidimensi, dan berbasis geoekonomi. Rekonsiliasi dengan aktor regional, penguatan diplomasi melalui forum multilateral seperti GCC, OIC, dan BRICS, serta perluasan kerja sama dengan Tiongkok menunjukkan bahwa Riyadh berupaya menempatkan diri sebagai aktor sentral dalam tatanan Timur Tengah yang semakin multipolar. Di sisi lain, perubahan ini juga berkontribusi terhadap stabilitas kawasan melalui pendekatan de-eskalatif dan pembangunan kemitraan ekonomi lintas negara. Namun demikian, transformasi tersebut belum sepenuhnya bebas dari tantangan, terutama terkait isu hak asasi manusia, transparansi tata kelola, dan legitimasi internasional. Oleh karena itu, Saudi Vision 2030 dapat dipahami sebagai proyek restrukturisasi ekonomi-politik yang tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan domestik, tetapi juga memperluas pengaruh regional dan meningkatkan posisi tawar Arab Saudi dalam konfigurasi geopolitik Timur Tengah.

## **REFERENSI**

- Amnesty International. (2021). Released and Exiled: Torture, Unfair Trials and Forced Exile of Yemenis under Huthi Rule. Amnesty International Report, 1–78. *Jurnal Amesty Internasional*. <https://www.amnesty.org>.
- Aramco, S. (2019). Annual Report . Corporate Report, 1–220. *Jurnal Aramco Annual Report*. <https://www.aramco.com>.
- Arezki, R. (2024). Saudi Arabia's Economic Shifts under MBS Raise Stability Concerns.

- Atlantic Council Issue Brief, 1(1), 1–10. *Jurnal Atlantic Council*.  
<https://www.atlanticcouncil.org>
- Chivvis, C. S., Miller, A. D., & Geaghan-Breiner, B. (2023). Saudi Arabia in the Emerging World Order. *Carnegie Endowment Report*, 1(1), 1–25.  
<https://carnegieendowment.org>.
- Doha Institute. (2023). Saudi Arabia's Foreign Policy Transformation and the Role of Economic Diplomacy. *Doha Institute Policy Paper*, 2(1), 1–18.  
<https://www.dohainstitute.edu.qa>.
- Farouk, Y. (2023). Riyadh's Motivations Behind the Saudi-Iran Deal. *Carnegie Middle East Analysis*, 1(1), 1–12. *Jurnal Analisis Timur Tengah*.  
<https://carnegieendowment.org>.
- Government of Saudi Arabia. (2016). Saudi Vision 2030. <https://www.vision2030.gov.sa>
- Harrison, Ross. (2023). Saudi-Iran Rapprochement amid Regional and Global Shifts. *Middle East Institute Analysis*, 1(1), 1–10. <https://www.mei.edu/blog/monday-briefing-saudi-iran-rapprochement-amid-regional-and-global-shifts?>
- Hassan, T. (2023). World Report 2023: Saudi Arabia. Human Rights Watch Report.<https://www.hrw.org>.
- Kinninmont, J. (July 2017). Vision 2030 and Saudi Arabia's Social Contract Austerity and Transformation . Middle East and North Africa Programme. *Chatham House Research Paper*, 1(1), 1–44.  
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3207251>
- Li-Chen Sim, & Aminjonov, F. (2024). The Evolving Roles of the Gulf States in the Low-Carbon Energy Transition. *Atlantic Council Issue Brief*, 2(1), 1–15.  
<https://www.atlanticcouncil.org>.
- Meester, J., van den Berg, W., & Verhoeven, H. (2018). Riyal Politik The political economy of Gulf investments in the Horn of Africa. *Clingendael Institute Report*, 1(1), 1–60.  
<https://www.clingendael.org>.
- MISA (Ministry of Investment Saudi Arabia). (2023). State of the Saudi Economy Annual Report 2023. *Government Report*, 1–120. <https://misa.gov.sa>.
- NEOM. (2022). NEOM Social Responsibility Report . NEOM Sustainability and Economic Diversification Report 1-90. *NEOM Report*. <https://www.neom.com>.
- Oxford Institute for Energy Studies. (2023). GCC political economy and regional energy security. *Oxford Energy Forum*, 130(1), 1–12. <https://www.oxfordenergy.org>
- PIF (Public Investment Fund). (2023). Public Investment Fund – Annual Report 2023. *Government Investment Report*, 1–150. *Government of Saudi Arabia*.  
<https://www.pif.gov.sa>. rights. POL:10/5670/2023.  
<https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/5670/2023/en/>.